



Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat

Desa Ramah Anak & Perempuan



Kesetiaan Santri Mengawal NKRI



Tantangan santri bukan sekedar mampu mengaji dan berdakwah melalui ceramah agama. Mereka dihadapkan pada realitas sosial yang dinamis. Perubahan yang cepat dan tak terduga harus disikapi dengan sigap. Santri tidak boleh gagap dan apatis terhadap perubahan yang terjadi.

Momentum penetapan hari santri 22 Oktober 2015 harus dimaknai dengan peran yang lebih besar. Resolusi jihad menjadi semangat perjuangan dan pengorbanan bagi NKRI harus terus tergelorakan. Dahulu santri turut mengangkat senjata, saat ini mengisi ruang publik dari hulu hingga hilir.

Ada *guyonan* khas santri ketika ditanya "Santri itu jurusannya apa?". Mereka akan menjawab "Menjurus sendiri". Meski terkecas dalam suatu candaan, namun memiliki makna yang dalam. Santri harus siap dan mampu menjadi apapun di masyarakat.

Banyak tokoh-tokoh nasional yang berlatar belakang santri. Misal Wakil Presiden, KH. Ma'ruf Amin. Bahkan dahulu ada Gus Dur sebagai Presiden yang juga berlatar belakang santri. Pada sektor lain seperti akademisi dan pengusaha pun tidak

sedikit dari mereka yang berlatar belakang santri.

Meski berlatar belakang santri, mereka memiliki andil dan karya besar untuk bangsa. Hal ini menandakan peran santri dalam menjaga dan mempertahankan NKRI dari masa ke masa tak pernah pudar. Kesetiaan santri dalam mengawal kemajuan NKRI tak perlu diragukan.

Peringatan hari santri 22 Oktober 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pandemi Covid 19 memberi signal bahwa cepatnya perubahan itu nyata. Sehingga kreativitas dan inovasi santri harus dipacu, terlebih pasca pandemi berlalu. Prediksi resesi ekonomi harus dipersiapkan dengan gelora *santripreneur*.

Santri harus mampu menciptakan lapangan kerja. Menyiapkan skema pemberdayaan masyarakat agar siap menghadapi segala kemungkinan. Inilah dakwah yang bukan sekedar retorika, namun mampu menghasilkan kebermaknaan yang nyata.

Semangat itu pula yang terus digelorakan oleh Cirebon Katon. Berjuang bersama santri dengan dakwah yang dikemas dalam tulisan. Berharap memberi manfaat dan menginspirasi setiap pembaca. Salam Cirebon Katon!

Pembina/Penasehat :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Pengarah :

Muklisin Nalahudin, SH, MH.
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

Abdul Rohman
(Ketua Komisi 1)

Mad Saleh
(Ketua Komisi 2)

H. Hermanto, SH
(Ketua Komisi 3)

Drs. H. Rasida Edy Priatna, MM
(Ketua Komisi 4)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Ikin Asikin, S.Sos, M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

Wakil Pimpinan Redaksi :

Drs. Raden Chaidir Susilaningrat
(Kabag persidangan)

Drs. H. Sucipto, MM
(Kabag Perundang-undangan)

Redaktur Pelaksana :

Mochammad Nurhiyana, S.STP., M.Si
(Kasubag Humas dan Protokol)

Redaksi Ahli :

S. Yudi

Penyunting :

Wiwin Winarti, S.IP
(Kasubag Rapat dan Risalah)

Ardiles Afla Jatiwanto
(Kasubag Rumah Tangga)

Redaktur :

IA Fazri

Reporter :

Firman • Maulana • Adi • Yusuf • Mahardika

Fotografer :

Alfian

Desain Grafis :

Boyke Datu • Andri

Data dan Riset :

Oman • Ihsan

Distribusi :

Adiw

Korespondensi:

redaksi.cika@gmail.com

Penerbit :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Perlu Pelibatan Desa

10 | Ketua KPAID Cirebon Fifi Sofiah Berjuang Mewujudkan Desa Ramah Anak



14 | KILAS

Temuan ADD belum direalisasikan



18 | PUBLIKA

Pasar Desa Mertapadakulon Tak Layak dikunjungi



20 | LENSA

13 Tahun Hidup Dari Sampah



22 | DINAMIKA KOMISI

Perlu Inventarisir Aset Desa Mertada Kulon

24 | Pasar Gebangilir Belum Miliki IMB, Komisi II Minta Tutup Sementara

26 | Belum ada Pembangunan TPT Sungai Cikanci

28 | Program Inovatif Puskesmas Susukan



30 | PROFIL

Fraksi PKS Kabupaten Cirebon Menggapai Masyarakat Madani !



33 | INSPIRASI

Desa Palir; menyulap irigasi penuh sampah menjadi kolam ikan mengalir

36 | POTENSI

Kerajinan Barang Bekas Potensi Gua Lor nan Menawan

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Perlu Pelibatan Desa

Kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali lebih banyak didominasi orang terdekat. Namun sampai hari ini, belum ada pelibatan pemerintah desa secara terorganisir, kenapa?



Foto: dok.baykendaru

Bunga bukan nama sebenarnya, seorang mahasiswi asal Kabupaten Cirebon. Ia mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampusnya. Dia mengeluh. Air matanya deras mengiringi saat dia bercerita.

Hal ini disampaikan Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Syekh Nurjati Cirebon Naila, kepada Cirebon Katon.

“Banyak mahasiswa yang terbuka ke kami, tentang kekerasan yang dilakukan di taman atau pun di tempat lainnya. Kami diam, dan membiarkan korban untuk bercerita terlebih dahulu. Kemudian kami menjaga rahasianya,” jelasnya.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol M Syahdudi mencatat, sebanyak 59 kasus kekerasan terh-

adap anak terjadi di Kabupaten Cirebon sejak Januari hingga September 2020. Rinciannya, 29 kasus telah memasuki proses penyidikan, dan 30 kasus lainnya masih dalam tahap penyelidikan untuk meminta keterangan saksi dan mengumpulkan bukti-bukti.

Jumlah kasus tersebut, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. “Selama

2019, kami menangani 39 kasus kekerasan terhadap anak, tahun ini bertambah,” katanya.

M Syahdudi juga mengatakan, kekerasan terhadap anak yang ditangani Satreskrim Polresta Cirebon, justru lebih banyak didominasi oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bahkan diantara pelaku dan korban sebelumnya pernah saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. “Para pelaku tersebut merupakan orang terdekat korban, baik pihak keluarga maupun tetangga korban,” tandasnya.

Naila bilang, apa yang dialami mahasiswa itu juga menimpa mahasiswa lainnya.

“Bunga adalah salah satunya dari banyaknya korban. Hanya saja memang jarang yang mau terbuka untuk bercerita,” katanya.

Sehubungan hal itu, PSGA IAIN Syekh Nurjati Cirebon pun berinisiatif menggodok Peraturan Rektor tentang Penanggulangan Pencegahan Kekerasan di kampus. Tujuannya untuk menciptakan suasana kampus yang aman. Beruntung, peraturan yang dibuatnya tidak lama mendapat persetujuan dari Rektor.

Naila mengatakan, kekerasan seksual merupakan bagian dari persoalan gender. Meskipun lingkup gender meliputi perempuan, laki-laki, anak-anak, hingga orang tua, Namun permasalahan gender banyak dialami oleh kaum perempuan.

Payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak sebenarnya telah ada dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon No 1 Tahun 2018.

“Perda itu lahir dalam rangka menjawab segala keresahan eksploitasi dan kekerasan perempuan dan anak,” kata Ismiyatul Fatihyah Yusuf, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon.

Menurutnya, Pemerintah daerah memang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap perlindungan perempuan dan anak. Sebagaimana hal ini juga diatur dalam UUD 39 Tahun 1999 dan UUD Nomor 35 Tahun 2014 tentang hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan aman dan hak mendapatkan keadilan.

“Perda juga dalam rangka memberikan perlindungan, sebagai turunan undang-undang. Karena seringkali perempuan dan anak itu, menjadi objek kekerasan dan paling dirugikan, paling banyak mengalami diskriminasi. Bahkan, dalam dunia kerja tidak sedikit perempuan yang pesangonnya lebih sedikit,” tuturnya.

Ismi juga melihat, kasus *Human Trafficking* yang kebanyakan objeknya itu perempuan dan anak.

Terakhir, soal perkawinan anak di bawah umur yang semestinya belum siap untuk menikah..



Foto-foto: Ihsan/ck

Rumah Aman Belum Layak

Sejauh ini, kata Ismi, dalam mengawal perlindungan kekerasan perempuan maupun anak, Kabupaten Cirebon telah menyediakan ‘Rumah Aman’ bagi korban tindak kekerasan. Hanya saja, kondisi rumah aman yang idealnya nyaman bagi korban, justru belum memenuhi kebutuhan.

“Seharusnya rumah aman itu harus ada psikologinya, psikiaternya. Agar korban benar-benar merasa aman, namun belum memilikinya,” katanya.

Kemudian, Ismi juga melihat, bahwa acapkali kasus kekerasan maupun tindakan asusila pada perempuan, cenderung tersorot lebih menitikberatkan kepada perempuan.

“Kemarin soal penyebaran video asusila misalnya, *framing* media seakan-akan perempuan saja yang salah. Padahal dia itu kan korban,” kata Ismi.

Dia pun menyadari, bahwa persoalan untuk mencegah kekerasan perempuan dan anak membutuhkan kerjasama berbagai elemen dan *stakeholder*.

Selain persoalan kekerasan terhadap perempuan. Eksploitasi anak-anak juga rawan terjadi. Naila mencontohkan, di lampu merah jalan raya Plered, ada banyak sekali anak yang terlantar di jalanan. Mereka menjadi pengamen dan pengemis. Hal ini juga sejalan dengan data di Unit PPA Polresta Cirebon.

bon, yang mengalami peningkatan pada tahun ini.

“Kadang-kadang sih anaknya tidak mau, tetapi karena disuruh oleh orang tuanya atau orang dewasa jadi terpaksa menurutinya, ini kan eksploitasi,” jelas Ismi.

Perkawinan Anak

Selain kekerasan, Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Cirebon Leli, melihat permasalahan perempuan di Kabupaten Cirebon, salah satunya adalah perkawinan anak.

Leli mengaku, kini tengah melakukan pendampingan pada 3 desa di Kabupaten Cirebon. Di desa tersebut ditemukan banyak sekali perkawinan anak. Menurutnya, hal itu disebabkan karena pergaulan bebas. Selain itu, persoalan pernikahan anak juga disebabkan karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya.

“Data ini didapatkan dari desa dampingan kami. KPI tingkat desa disebut Balai Perempuan. Kita membentuk balai perempuan. Temen-temen Balai Perempuan itu mendata suaminya siapa, umurnya berapa dan lain-lain,” katanya.

Leli merasa prihatin, saat ini nilai tawar perempuan masih dianggap rendah di mata masyarakat. Perempuan masih dijadikan korban atas permasalahan yang dihadapi orang tuanya. Leli menyebutkan, dalam kekerasan seksual yang mengakibatkan hamil sebelum menikah, perempuan rentan dijodohkan oleh orang tuanya. Sebab orang tua tidak ingin menanggung anaknya.

“Padahal secara kebutuhan perempuan itu belum siap. Karena masih membutuhkan pendidikan dan bermain,” ungkapnya.

Sudah jatuh, ketuban tangga. Begitu nasib yang banyak dialami oleh kaum perempuan. Ya, setelah korban mengalami kekerasan. Korban tidak boleh bersuara untuk menuntut hak keadilannya. Pasalnya hal itu dianggap akan menurunkan citra tokoh masyarakat setempat.

“Padahal kan nama baik si korban sudah tercoreng jelek, masa depan harga diri si korban menjadi hancur tapi perempuan tetap saja dibuat diam tanpa boleh bersuara kuat”, ungkapnya

Perlu Pelibatan Desa

Leli menyoroti, bahwa belum maksimalnya implementasi Perda No 1 Tahun 2018, dikarenakan belum adanya pelibatan terorganisir dari Pemdes se Kabupaten Cirebon. Seharusnya, kata Leli, sebagian anggaran dana desa dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan.



“Cuman kadang kepala desa belum paham atau pura-pura tidak paham, sehingga dana tersebut hanya diprioritaskan untuk pembangunan fisik. Sementara untuk pembangunan manusia itu hanya berapa persen,” ujarnya.

Kendati demikian, Leli mengungkapkan, ada beberapa desa yang menjadikan program pemberdayaan perempuan menjadi program prioritasnya. Contohnya di desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan, tempat dampingan KPI.

“Intinya di Musrembangdes teman-teman perempuan mau mengajukan program itu. Biar sinergi antara perempuan dan desa bisa maksimal,” tandasnya.

Sejauh ini, Leli bilang, KPI telah melakukan berbagai hal dalam pendampingan perempuan di desa-desa. Seperti Sosialisasi Kesehatan Reproduksi, Pembelian Alat-alat Kesehatan untuk Lansia dan lain sebagainya. Kegiatan itu Bekerjasama dengan UPT kesehatan wilayah setempat.

“Pemerintah Desa yang membelikan alat-alatnya. Tetapi pengelolannya diberikan kepada Balai Perempuan. Dan, UPT Kesehatan yang memaparkan tentang kesehatan perempuan,” ungkapnya.

“Kampanye kita pencegahan perkawinan anak, di satu sisi ketika program KPI berhenti. Paling tidak ada kerjasama masyarakat dengan pemerintah tetap terjalin. Mengajukan program dengan dana desanya. Itu juga salah satu itikad pemberdayaan,” ujarnya.



Senada dengan itu, Ismi juga menyoroti soal pernikahan anak di bawah umur. Menurutnya, pernikahan anak harusnya saat anak sudah berumur cukup. Karena selain persoalan agama, aspek lainnya tetap harus diperhatikan. “Ketika perempuan anak matang, tentu bisa mendidik anaknya. Perlu kedewasaan dalam pernikahan itu. Sangat menyayangkan jika masih anak sudah menikah. Padahal hal itu dapat menyebabkan perceraian dini, kekerasan akibat psikisnya yang belum matang,” ujarnya.

Menurutnya, kalau hal itu tidak dikontrol dengan tegas. Maka akan tetap masuk lingkaran setan. Perlu pemerintah mengatur secara tegas dalam mengatur batas minimal umur pernikahan.

Lulusan Curtin University of Technology, Perth, Western Australia itu pun menyoroti, bahwa implementasi Perda yang ada sejauh ini memang belum terealisasi dengan maksimal. Pertama, soal aturan minimal umur pernikahan yang seharusnya 19 tahun bagi perempuan, namun dalam pelaksanaannya masyarakat terutama di desa justru belum familier.

“Buat saya kurang kesadaran memahami itu,” jelasnya. Menurutnya, hal itu juga dikarenakan budgeting anggaran yang terbatas pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP-PKBP3A) sebagai *leading sector* untuk sosialisasi pencegahan. Sehingga belum mampu memaksimal-

kan program untuk mitigasi persoalan perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon, yang salah satunya berkaitan pernikahan anak.

Namun, kata Ismi, sekalipun implementasi Perda belum maksimal, setidaknya dengan adanya Perda, minimal bisa menjadi payung hukum bagi korban, dalam tindakan melindungi kekerasan yang kerap terjadi terhadap perempuan dan anak.

Ia pun bersama segenap Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon berencana akan merevisi dan meninjau kembali aturan tersebut, sekaligus mengevaluasi program pada dinas terkait.

Sekalipun ia melihat, bahwa hal ini tidak terlepas dari peran KUA yang menjadi pelaksana di masyarakat dalam meminimalisir pernikahan anak yang terkadang terbentur dengan keadaan di masyarakat. “Saat ada kasus yang hamil di luar pernikahan misalnya. Tentu sikap ortunya mau tidak mau harus dinikahkan,” ujarnya.

Sehingga, kata Ismi, tidak kalah penting peran masyarakat juga dalam menjadi *Sosial Watch* yang bisa ikut serta mengawasi dalam pencegahan pernikahan dini. “Cuman terkadang masyarakat juga tak mau repot. Ketika orangtuanya menginginkan anaknya untuk menikah cepat, baik karena keadaan ekonomi, maupun karena kecelakaan, mau bagaimana lagi, akhirnya dinikahkan,” tuturnya.

“Jika perdanya ada, tapi masyarakatnya tidak diedukasi itu kan percuma juga. Karena soal pernikahan anak itu adanya pada kesadaran partisipatif masyarakat juga,” tambahnya lagi.

Perbup Belum Ada

Selain itu, Perda P3A ini yang idealnya melahirkan turunan peraturan hierarki baru, justru belum melahirkan Perbup sendiri.

Menurutnya, seharusnya perlu Perbup yang mengatur juga. Akhirnya akan lahir Perdes untuk disepakati. “Perdes itu, di desa lain tidak didorong. Kan Perbupnya saja belum,” katanya.

Leli mengingatkan, bahwa pembangunan manusia akan tercapai bila seluruh elemen masyarakat turut andil berperan. Karenanya, Leli berharap kepada pemerintah desa se Kabupaten Cirebon untuk bersama-sama saling membahu memberdayakan perempuan-perempuan desa.

“Sebenarnya kalau di setiap desa ada yang menggerakkan, maka progresnya bagus. Intinya kalau perempuan diajak berorganisasi, kemudian diarahkan untuk kebaikan, insya Allah harkat dan martabat perempuan tidak lagi dipandang rendah,” pungkasnya. •Suf/Muis

Korban Kekerasan Didominasi Pelajar

Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan terus meningkat. Saatnya, setiap pribadi peduli. Pelaku sering kali berasal dari keluarga terdekat.



Foto: foto: dok WCC

Sa'adah tak kuasa menahan air mata. Manager Women Crisis Center (WCC) Mawar Balqis Cirebon itu tersentuh dengan cerita seorang ibu yang anaknya mengalami kekerasan.

Sebuat saja Mawar, bukan nama sebenarnya. Ibu korban itu bercerita, akibat korban kekerasan seksual yang menimpa anaknya, korban mengalami tekanan psikologis berat. Bahkan, korban tersebut kehilangan nafsu makan.

Apa yang menimpa Mawar, juga dirasakan oleh keluarga yang lainnya. Sa'adah bilang, banyak korban dan keluarga korban yang melapor ke WCC Mawar Balqis Cirebon, untuk

melaporkan kekerasan yang dialaminya, termasuk diantaranya kekerasan seksual. Ada yang datang langsung ke kantor lembaga, maupun melaporkannya melalui telepon dan email.

"Keluarga korban yang datang langsung ke sekretariat WCC Mawar Balqis kami itu berbeda-beda. Ada yang melalui temannya didampingi oleh WCC Mawar Balqis. Ada juga yang dari jaringan organisasi," katanya.

Faktor Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan

Sepanjang tahun 2019, kekerasan seksual mendominasi dari kasus kejahatan lainnya,

seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan *Traficking*. Rinciannya, kekerasan seksual mencapai 90 kasus, KDRT sebanyak 48, sementara *Traficking* hanya 2 kasus.

"Kekerasan terhadap perempuan dan anak didominasi oleh pelajar berusia SLTP-SLTA. Bahkan sampai mencapai 71 kasus," ungkapnya.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut bukanlah tanpa sebab. Sa'adah bilang, sederet faktor permasalahan mereka hadapi, pertama, masih tingginya sistem patriarki di Indonesia.

"Budaya di Indonesia, peran seorang laki-laki masih le-

bih mendominasi peran perempuan," katanya.

Kedua, masih banyak ketimpangan relasi yang terjadi di masyarakat. "Biasanya dalam lingkup pekerjaan, atasan lebih dominan dari bawahan misalnya, atau guru ke siswa, orang tua ke anak," ujarnya.

Ketiga, terbatasnya akses dan informasi bagi perempuan dan anak terkait hak-hak dasarnya. Contohnya, informasi yang bisa membantu bagi mereka dalam mencegah tindakan yang berdampak pada kekerasan seksual.

Keempat, implementasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak belum terealisasi dengan maksimal. Terutama bagi mereka yang sudah menjadi korban kekerasan.

Kelima, secara tidak sadar, masyarakat masih memberikan ruang dan celah bagi pelaku untuk mengulang kembali tindakan yang dilakukan terhadap korban. Contohnya, budaya mengawinkan pasangan laki-laki dan perempuan akibat tindakan yang diduga melanggar norma dan kebiasaan.

"Masyarakat masih berasumsi bahwa menikahkan antara pelaku dengan korban adalah sebuah solusi atas pelanggaran norma yang dilakukannya. Padahal dugaan itu belum terbukti kebenarannya," ungkapnya.

Keenam, nilai tawar seorang perempuan masih dianggap rendah di mata masyarakat. Perempuan masih dijadikan korban atas permasalahan yang dihadapi keluarganya. Dalam kasus ini, biasanya anak-anak berangkat dari keluarga *Broken home*, kurang bimbingan orang tua dan salah pergaulan. Sehingga orang tua lebih memilih untuk segera



menikahkan anaknya tersebut.

"Padahal menikahkan anak secara dini itu sudah membuka pintu kekerasan bagi anak. Karena secara fisik anak belum siap. Tim Medis juga menjelaskan, bahwa rahim anak belum siap untuk melakukan reproduksi, karena berpotensi berdampak pada keguguran dalam proses melahirkan anaknya. Itu kan sangat mengancam nyawa si anak tersebut." ungkapnya.

Butuh Banyak Elemen

Keberadaan perempuan dan anak sangat berperan penting dalam proses pembangunan negara. Karena itu, Sa'adah mengingatkan, bahwa kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak diharapkan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan.

Dia pun menyoroti peran dan tanggung jawab pemerin-

tah daerah dan pemerintah desa. Menurutnya, pemda dan pemdes memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya kekerasan seksual yang menimpa perempuan.

Terutama Pemda, lanjutnya, memiliki banyak tenaga ahli di tingkatan akar rumput. Sehingga peranannya perlu dimaksimalkan, baik secara *preventif* maupun *kuratif*. "Misalnya, Dinas DP2KBP3A didalamnya ada satuan *caretaker* seperti TPD, Motekar, UPT5A. Saya kira sangat strategis untuk melakukan upaya-upaya itu," ungkapnya.

Bukan hanya Pemda, kata Sa'adah, Pemdes juga harus berperan maksimal dalam upaya tersebut. "Dari anggaran dana desa, Pemdes bisa melakukan sosialisasi ke tempat pengajian, PKK maupun karang taruna. Atau memasang informasi pencegahan kekerasan menggunakan banner," jelasnya. • **Dul**

Ketua KPAID Cirebon Fifi Sofiah Berjuang Mewujudkan Desa Ramah Anak

Tiga hingga empat kasus kekerasan anak dilaporkan ke Polresta Cirebon setiap pekannya. Selain sebagai korban, anak juga kadang menjadi pelaku kekerasan.



Foto: foto: dok Fifi Sofiah

Keerasan terhadap anak di Kabupaten Cirebon sudah cukup kronis. Setiap minggu unit PPA Polresta Cirebon hampir selalu menerima laporan

dari warga soal kekerasan bagi anak. Hal ini membuktikan bahwa mitigasi terhadap kekerasan bagi anak harus dilakukan bersama oleh semua pihak.

Kelompok Masyarakat Peduli Perlindungan Anak (KMPPA) pun, menginisiasi pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Cirebon. Untuk mengetahui bagaimana kehadiran KPAID Cirebon dalam menjadi leading sector dan mengawal perlindungan kekerasan terhadap anak. Reporter Cirebon Katon mewancarai **Ketua KPAID Cirebon Fifi Sofiah**. Berikut petikannya :

Bisa diceritakan, bagaimana KPAID Cirebon lahir?

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002, dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002.

Keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Adapun keanggotaan KPAI pada tataran pusat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan

Rakyat RI.

Untuk Kabupaten Cirebon sendiri, terbentuknya KPAID Kabupaten Cirebon atas inisiatif warga yang peduli dengan perlindungan anak. Mereka mengusulkan dan disetujui oleh Bupati Cirebon Imron Rosyadi, melalui SK pembentukan KPAID Kabupaten Cirebon, dan dilantik pada 13 Oktober 2020 di Pendopo Bupati Cirebon.

Nah, kalau tugas pokok dan fungsinya kita berkaca pada aturan yang ada. Dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak, dijelaskan tugas pokok KPAI/KPAID berbunyi sebagai berikut: a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; b) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; c) Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; d) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; e) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak; f) Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan g) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Apa saja program yang akan dilakukan oleh KPAID Cirebon ke depan?

Ada beberapa program yang kita canangkan pasca pelantikan KPAID Cirebon kemarin, diantaranya:

Pertama, kita akan meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak. Kedua, kita juga



akan membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak. Ketiga, meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak.

Kemudian, keempat, kita juga akan melakukan peningkatan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak. Kelima, meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat. Keenam, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM yang profesional, kredibel dan terstruktur. Sehingga diharapkan tugas dan fungsi KPAI dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.

Selanjutnya, ketujuh, program penguatan kesadaran masyarakat untuk mendorong tersedianya sarana dan prasarana pendukung, yang memberikan kemudahan akses terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di semua sektor. Kedelapan, melakukan perspektif dan

pendekatan yang holistik, komprehensif tetapi bukan parsial dalam merespon masalah atau kasus. Karena masalah atau kasus anak tidak pernah berdiri sendiri, namun selalu berurusan dengan berbagai aspek kehidupan yang kompleks.

Kesembilan, program disseminasi konsep Indonesia Ramah Anak (IRA) pada berbagai pemangku kewajiban dan penyelenggara perlindungan anak yang meniscayakan adanya *child right mainstreaming* dalam segala aspek dan level pembangunan secara berkelanjutan.

Kesepuluh, kita juga akan melakukan penguatan mekanisme sistem rujukan (*reveral system*) dalam penerimaan pengaduan. Sehingga KPAID yang dalam hal ini dipandang penting, dapat memantapkan proses penanganan masalah perlindungan anak yang bersumber dari pengaduan masyarakat.

Terakhir, kita juga akan melakukan kemitraan strategis

dengan pemerintah dan *civil society* dalam setiap bidang kerja dan isu. Hal ini agar setiap permasalahan bisa mendapatkan rekomendasi dan solusinya yang tepat, serta terpantau perkembangannya.

Bagaimana KPAID Cirebon melihat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cirebon?

KPAID memandang kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cirebon sungguh sangat memprihatinkan, apalagi sekarang ini dalam masa pandemi Covid-19, tidak hanya bidang kesehatan saja yang terdampak, ekonomi dan pendidikan juga. Kekerasan terhadap tak kalah berdampak.

Berdasarkan informasi yang kami dapat dari instansi terkait dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Jumlah kasus anak, baik anak sebagai korban, maupun anak sebagai pelaku itu cukup signifikan. Di kepolisian khususnya di unit PPA ada 3-4 kasus setiap minggu yang dilaporkan warga. Jumlah tersebut baru yang dilaporkan, belum yang tidak dilaporkan, karena warga masih memandang kasus anak ini tabu untuk dilaporkan dan diproses.

Hal tersebut karena seringkali kekerasan terhadap anak justru dilakukan oleh keluarga maupun orang terdekat. Sehingga keluarga merasa dilema seandainya kasus anak dilanjutkan ke proses hukum. Tak sedikit pula yang kemudian selesai secara kekeluargaan untuk menutupi aibnya. Padahal di situ ada yang dikorbankan yaitu anak.

Lalu, langkah apa yang akan dilakukan oleh KPAID melihat kekerasan terhadap anak yang cukup signifikan itu?



Sesuai dengan tugas dan fungsinya, kami akan turun ke desa-desa untuk memberikan edukasi dan motivasi kepada warga, baik ke anak atau pun ke orang tuanya sendiri. Karena kasus anak tidak hanya dengan melihat bahwa anak sebagai korban. Tetapi anak yang menjadi pelaku, itu pun sebagai korban oleh orang dewasa juga.

Kami juga sudah sepakat dengan pihak kejaksaan untuk memberikan edukasi hukum kepada pelajar-pelajar.

Sebagai lembaga mitigasi kekerasan terhadap anak, apa yang menjadi penghambat bagi KPAID?

Sebagai lembaga negara yang baru di Kabupaten Cirebon, tentunya masih menyesuaikan diri baik di internal maupun eksternal. Di internal karena kami baru ketemu dalam wadah bersama dari berbagai unsur. Sehingga perlu waktu untuk menyesuaikan diri antara satu

komisioner dengan komisioner yang lain.

Di eksternal, dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi KPAID di tengah-tengah masyarakat. Selama ini masyarakat juga masih buta memahami KPAID. Dimana ketika kasus-kasus KDRT terhadap perempuan pun, sebagian masyarakat minta untuk didampingi dan diadvokasi. Padahal tugas kita khusus anak 0-18 tahun.

Terakhir, apa yang menjadi harapan bagi KPAID Cirebon dalam bekerja sebagai lembaga yang dipercaya melindungi kekerasan terhadap anak?

Harapan kami di KPAID Cirebon tidak muluk-muluk, cukup menargetkan visi kita tercapai. Dimana dapat membantu harapan Kabupaten Cirebon, yaitu mewujudkan Desa Ramah Anak. Tentunya hal ini harus dilakukan secara kooperatif oleh semua pihak juga. •suf

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

Temuan ADD belum direalisasikan

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, saat audit regular terhadap evaluasi penggunaan dana desa yang ada di desa Tuk kecamatan Kedawung



Foto-foto : dok sethwan

Rencana Perluasan lahan PT Smart TT

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, saat melakukan pengawasan di PT Smart Tech Tex terkait perizinan perluasan perusahaan.



Foto-foto : dok sethwan

Serap Aspirasi Pemeliharaan Jalan dan Drainase

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, saat melakukan peninjauan pemeliharaan jalan dan drainase di wilayah Kecamatan Ciledug.



Foto-foto : dok sethwan

SMPN 1 Dukupuntang dan Puskesmas Keluhkan Tenaga Honorer

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon saat menerima aspirasi keluhan guru honorer di SMPN 1 Dukupuntang dan Puskesmas Ciwaringin.



Foto-foto : dok sethwan

Pasar Desa Mertapadakulon Tak Layak dikunjungi



Foto: foto: ihsan/dk

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Saya Sarah (23) warga desa Sidamulya, Kecamatan Astanajapura. Desa saya berbatasan dengan Desa Mertapadakulon. Saya bekerja sebagai pedagang Sayur di Pasar Desa Mertapadakulon.

Kondisi pasar desa Mertapadakulon ini menurut saya sudah sangat tidak layak dikunjungi. Pasalnya atapnya sudah banyak yang bocor. Bahkan, kontruksi bangunannya sudah rapuh dan rawan ambruk. Apalagi sekarang musim

hujan. Sepanjang jalan di halaman pasar Mertapadakulon ini langganan becek. Bahkan tidak jarang terjadi banjir.

Akibat kondisi pasar seperti ini, banyak pelanggan saya yang tidak mau berkunjung lagi pasar ini. Mereka lebih memilih membeli bahan makan pokoknya ke pasar kecamatan lain. Sehingga hasil barang dagangan saya seringkali tidak laku.

Mohon kiranya bapak / Ibu dewan bisa terus mendorong pihak desa Mertapadakulon untuk memperbaiki keadaan pasar yang sudah tidak layak dikunjungi ini.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sarah (23) - Pedagang - Astanajapura.

Jawab:

Terimakasih Sarah atau surat dan informasinya, akan kami sampaikan ke instansi terkait.

Jembatan Rusak

Salam Hormat,

Yang terhormat Bapak dan Ibu anggota dewan.

Saya lela (20) warga Desa Kalipasung. Desa kami Terletak di Perbatasan Kecamatan Pangenan. Jalan menuju daerah kami terdapat Jembatan yang menjadi penghubung antar Kecamatan. Kondisinya saat ini membahayakan bagi pengenda-

ra yang melintas. Selain itu kondisi gelap sebab belum ada lampu penerangan. Parahnya kerusakan jembatan ini sudah banyak memakan korban. Kami berharap ada perbaikan jembatan rusak dan lampu penerangan.

Mohon kiranya Bapak dan Ibu anggota dewan dapat memperhatikan dan meneruskannya pada dinas

terkait. Atas perhatiannya diaturkan terima kasih.

Lela (20)-Mahasiswa-Kalipasung

Jawab:

Terimakasih Lela atau surat dan informasinya, akan kami sampaikan ke instansi terkait.



Bahaya Sampah Masker Medis



Assalamu'alaikum. Wr. Wb.
Dengan Hormat, Bapak/ibu dewan yang terhormat, di masa pan-

demi ini kita dianjurkan memakai masker demi pencegahan penularan covid-19. Menurut informasi mask-

er medis paling aman untuk mencegah virus lewat udara. Namun Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut masker medis sulit terurai, tidak ramah lingkungan, dan hanya untuk pegawai medis.

Tapi yang saya lihat, masih banyak masyarakat yang menggunakan masker medis sekali pakai dan membuang sembarangan tanpa pengolahan. Bagaimana mengatasi sampah masker medis yang digunakan masyarakat itu agar tidak semakin merusak lingkungan? Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Nina (22) - Mahasiswa - Sumber.

Jawab:

Terimakasih Nina atas kepedulian Anda terhadap lingkungan. Kami akan meneruskan hasil pengamatan Anda ke instansi terkait agar turut mendisiplinkan masyarakat.

13 Tahun Hidup Dari Sampah

Melihat truk pengangkut sampah memasuki areal TPAS Gunung Santri, Erni terlihat sumringah. Wanita 65 tahun itu menyambutnya dengan suka cita. Dengan sigap ia mengais rezeki.

Warga Desa Gunung Santri, Palimanan, itu 13 tahun sudah mencari makan dari tumpukan sampah. Botol plastik bekas minuman sangat berharga baginya.

Dari sampah ia bisa mencukupi kebutuhan keluarga. "Rp 300 – 400 ribu dalam satu minggu, sudah cukup," ujarnya. Ia bersyukur, meski bekerja di tempat sampah, merasa selalu sehat. "Alhamdulillah masih diberi kesehatan, dan tidak ada penyakit yang aneh-aneh," ujarnya.



Foto-foto: aifan/ck

Perlu Inventarisir Aset Desa Mertada Kulon

Sudah berganti 3 kali kuwu,. Namun aset desa Mertapada Kulon masih dipermasalahkan. Bahkan, sebagian telah hilang.



Foto: foto: doksetman

Pengelolaan aset desa berperan penting dalam Pemerintahan Kabupaten Cirebon. Pasalnya, jika aset desanya baik, maka aset daerah pun akan menjadi baik. Karenanya, pengelolaan aset desa menjadi perhatian Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon.

Untuk menangani aset ini, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon melakukan Kunjungan Kerja ke Desa Mertapada Kulon, Keca-

matan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Kunjungan tersebut dalam rangka ingin mengetahui secara langsung, terkait dengan pengelolaan aset desa yang ada di Desa Mertapadakulon, Kecamatan Astanajapura.

Kunjungan kerja tersebut, dihadiri Camat Astanajapura beserta jajarannya, Kuwu serta BPD Desa Mertapada Kulon. Selain itu, hadir juga muspika dan perwakilan dari Dinas Pem-

berdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Abdul Rohman, mengatakan kunjungan ini juga dalam rangka menindaklanjuti rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon. Ia bilang, perlunya pengawasan terhadap (DPMD) dan Kecamatan terkait dengan kinerjanya.

Ketua BPD Desa Mertapadakulon A Fauzi, menyampaikan,

aset tanah yang dimiliki oleh Desa Mertapada Kulon saat ini seluas 23,5 hektar. Jumlah luasan tersebut berupa tanah bengkok dan titisara. Rinciannya, tanah Bengkok seluas 19,5 hektar, sedangkan tanah titisara seluas 4 hektar.

Dari luasan tersebut, lanjutnya, tanah titisara seluas kurang lebih 2 hektar telah ditukargulingkan oleh pihak Buntet Pesantren Cirebon, dan telah diperuntukkan bangunan Akademi Perawatan (AKPER), MAN 3 Cirebon dan SMK Mekanika.

Namun masalahnya, kata Fauzi, sebagian tanah pengganti bangunan itu, telah diperjualbelikan oleh oknum tertentu. Bahkan, dibeli tidak sesuai dengan total yang ditukargulingkan. "Sampai dengan 3 periode jabatan kuwu, permasalahan tersebut belum bisa diselesaikan," ungkapnya.

Ia juga menambahkan, bahwa ada beberapa aset yang hilang. Aset tersebut berupa tanah yang disewakan oleh pihak lain dengan masa 10 sampai 20 tahun, yang diperuntukkan pembangunan kios pasar.

"Aset tanah tersebut, awalnya disewakan dengan masa sewa 1 tahun. Kemudian diperpanjang dengan waktu sewa kembali oleh pihak lain dengan waktu sewa selama 10-20 tahun," paparnya.

Senada dengan itu, Camat Astanajapura juga menyampaikan, kondisi aset yang ada di Desa Mertapada Kulon, yang masih belum memiliki keberadaan secara administratif. "Mestinya, luasan ataupun status tanah yang menjadi aset desa itu diinventarisir secara sistematis," ungkapnya.

Rohman menilai, dalam melakukan penginventarisiran aset desa, Desa Mertapada



Kulon, masih belum tertib. Sehingga hal ini menjadi persoalan tersendiri dalam pembenahan pengelolaan aset desa kedepannya. Untuk itu, Rohman mengimbau kepada Pemerintah Desa Mertapadakulon, agar segera berbenah terkait dengan pengelolaan aset desanya.

"Jangan sampai banyak aset desa di Kabupaten Cirebon menjadi hilang," pesannya.

Rohman juga menyarankan, harus ada tim inventarisir dari desa untuk penataan aset desa.

"Alokasikan dari dana desa untuk membentuk tim khusus

penginventarisir dan menelusuri aset yang dimiliki oleh desa. Setelah dilakukan inventarisir aset, langkah selanjutnya yaitu sertifikasikan terhadap aset itu," jelasnya.

Selain itu, Rohman juga menyarankan, bahwasanya tanah bengkok dan titisara, seharusnya disatukan kedalam tanah kas desa, agar pengelolanya lebih mudah.

Ia juga berencana, akan menindaklanjuti hasil dari kunjungan kerja ini untuk dijadwalkan dalam rapat kerja komisi.

•Abdul

Pasar Gebangilir Belum Miliki IMB, Komisi II Minta Tutup Sementara

Perizinan Pembangunan Pasar Swasta Desa Gebangilir Kecamatan Gebang sampai saat ini belum ditempuh. Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon menyarankan untuk ditutup sementara terlebih dahulu.



Foto: foto: doksetman

Bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Satpol PP dan Muspika Kecamatan Gebang, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja ke Pasar Desa Gebangilir. Kedatangannya sudah ditunggu. Teru-

tama bagi Kuwu desa setempat. Mad Saleh, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mengatakan, pihaknya mendapat banyak aduan dari masyarakat. Terutama terkait perizinan Pasar Gebangilir yang belum ditempuh, akan tetapi, sudah diba-

ngun ruko. Selain itu, pekerja pembangunan pasar ini juga belum dibayarkan. Karena itu, lanjutnya, kunjungan kerja tersebut dalam rangka, ingin mengetahui secara langsung terkait status dan perizinan Lokasi Pasar tersebut.



“Kami ingin mengetahui terkait dengan legalitas hukumnya seperti apa?” tanya Mad Saleh.

Menjawab itu, Kuwu Gebangilir Slamet, membenarkan

aduan yang disampaikan masyarakat. Ia mengaku, pemerintah desa saat ini telah mendatangi pihak swasta untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kami sudah menyampaikan kepada pihak swasta untuk menyelesaikan perizinannya terlebih dahulu, baru melaksanakan pembangunan. Juli lalu, kami baru dikasih Rekomendasi izin Fatwa,” ungkapnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Khanafi, membenarkan apa yang dikatakan Slamet. Khanafi menyayangkan, ketidakhadiran pihak owner dalam kunjungan ini. Karenanya, dia berharap untuk sementara waktu ini, Pasar Swasta Desa Gebangilir Kecamatan Gebang agar ditutup terlebih dahulu. Tujuannya, agar pihak swasta secepatnya dapat menyelesaikan perizinannya.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon R Cakra Suseno, menambahkan, dengan belum ditempuhnya Perizinan Pembangunan Pasar Swasta Desa Gebangilir. Maka akan berdampak pada masalah lain. Salah satunya yaitu masalah kemacetan.

“Adanya pembangunan ini pihak kepolisian merasa kesulitan dalam mengatur lalu lintas yang ada di jalan ini,” katanya.

Selain itu, Cakra melihat, Pasar Gebangilir juga masih belum memiliki instalasi alat Pemadam Kebakaran. Ia menghimbau kepada pihak Pasar agar menempuh Perizinan, sehingga tidak ada yang dirugikan.

Sementara itu, Kabid Gakperumda Dinas Satpol PP Iwan S mengatakan, pihaknya akan mengundang pihak owner secepatnya. Tujuannya untuk mengklarifikasi, terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kelengkapan legalitas administrasi.

“Kalau besok pihak owner tidak hadir, maka kami akan melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagai Penegak Perda,” ungkapnya. •Abdul

Belum ada Pembangunan TPT Sungai Cikanci

Curah hujan kerap menyebabkan banjir warga sekitar sungai Cikanci. Namun, sampai saat ini masih belum ada perbaikan dari BBWSCC Kota Cirebon terhadap kondisi sungai.



Foto: foto: dok sethian

Kondisi Sungai Cikanci yang berada di blok Parenca Desa Gemulung Lebak, Kecamatan Greged telah longsor karena pergerakan tanah. Hal itu sudah dua kali terjadi di bibir tebing sungai Cikanci, yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan.

“Longsor yang pertama terjadi pada September lalu, akibat hujan deras yang turun dan

menyebabkan longsor. Sehingga, jarak rumah warga dengan bibir tebing sungai Cikanci pun, menjadi semakin dekat, yakni, hanya kurang dari satu meter,” ujar Camat Greged Dedi Supardi.

Selain itu, abrasi sungai Cikanci juga telah menyebabkan keretakan pada rumah warga yang lokasinya dekat dengan tebing. Hal tersebut memunculkan keresahan dan ketakutan warga. Mereka

berpikir, longsor akan kembali terjadi dan akan membahayakan mereka suatu saat.

Mendengar laporan itu, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon pun, didampingi Badan Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (BBWSCC), Camat Greged, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Cirebon bergegas, menuju Desa Gemu-

lung Lebak Kecamatan Greged.

Dari pantauan Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, sejumlah 8 unit rumah persis berada di bibir sungai Cikanci. Selain itu terdapat retakan pada tanah yang sudah masuk pada lahan pemukiman warga.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Hermanto, mengatakan, hal itu dapat membahayakan keselamatan warga serta tempat tinggalnya. Ia berjanji, dalam waktu dekat, kedelapan rumah yang lokasinya persis di bibir tebing sungai Cikanci, akan segera direlokasi untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. “Relokasi itu akan menggunakan tanah milik desa,” jelasnya.

Selain itu, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, juga menerima laporan bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini, pasca hilangnya empat rumah yang terbawa longsor, masih belum ada perbaikan dari BBWSCC Kota Cirebon, terhadap kondisi sungai untuk menangani permasalahan tersebut.

Dedi bilang, warga desa Gemulung Lebak, sampai saat ini masih menantikan adanya relokasi ganti untung hingga akhir tahun kemarin. baik dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon, Dinas PUPR Kabupaten Cirebon maupun dari BBSWCC Kota Cirebon. Namun, ia bilang masih menunggu pembebasan lahan.

“Padahal, Pemerintah Daerah (Pemda) pernah menjanjikan mengenai pelepasan lahan itu pada akhir tahun sekarang. Namun sampai sekarang belum dilakukan,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Hermanto, beserta anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mendorong BBWSCC agar segera



melakukan perbaikan tebing sungai Cikanci, sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah di lokasi longsor tersebut.

“Kami mendesak BBWS Cimanuk Cisanggarung, untuk secepatnya merealisasikan pembangunan TPT. Kami tidak ingin ada lagi masyarakat yang harus mengungsi atau direlokasi,

Mengkonfirmasi itu, Humas BBWS Cimanuk Cisanggarung yang hadir dalam kunjungan berjanji, akan menyampaikan aspirasi dari Komisi III DPRD Ka-

bupaten Cirebon, perihal penanganan tebing sungai Cikanci kepada Pimpinan BBWS Cimanuk Cisanggarung agar segera ditindaklanjuti

Hermanto berharap, dengan adanya kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon ke wilayah tersebut, dapat menyampaikan aspirasinya kepada Pemda agar dapat cepat direalisasikan.

“Kendala itulah yang menjadi penghambat perbaikan sungai Cikanci,” katanya.

Program Inovatif Puskesmas Susukan

Puskesmas Susukan meraih Akreditasi Utama dalam pelayanan kesehatan. Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon pun berkunjung.



Foto: foto : dok setawan

Setelah meraih Akreditasi utama, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon didampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, berkunjung ke Puskesmas Susukan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Ahmad, mengucapkan selamat atas Akreditasi Utama yang telah diraih UTP Puskesmas Susukan. "Dengan sarana prasarana di Puskesmas Susukan yang tertata rapih, dan pelayanan yang memadai, memang layak mendapatkan akreditasi," ucap Ahmad.

Menurutnya, karena mendapatkan Akreditasi Utama, pelayanan harus bisa mendukung penanganan yang lebih optimal. Ia pun, menanyakan pelayanan apa saja yang ada di puskesmas Susukan.

Menanggapi itu, Kepala Puskesmas Susukan Dr Andi Ridwan Sahrudin memaparkan, bahwa Puskesmas Susukan mempunyai visi yakni, 'Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Bermutu'. Adapun misinya, dengan mengupayakan pelayanan kesehatan yang

bermutu merata dan terjangkau, dan mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait, serta meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana puskesmas.

Selain itu, kata Andi, 'Kesehatan anda adalah kebahagiaan kami, merupakan moto Puskesmas Susukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Kami selalu mengedepankan suasana yang ramah, inovatif,

aman, dan profesional sehingga masyarakat yang berkunjung ke puskesmas susukan akan merasa nyaman," katanya.

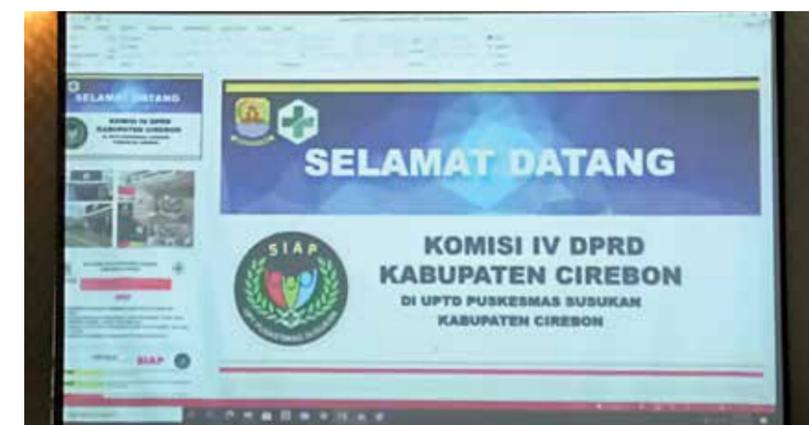
Terkait jumlah pegawai yang ada di Puskesmas Susukan, Sekretaris Komisi IV H Mahmudi menanyakan, jumlah pegawai yang sampai saat ini masih memadai untuk pasien yang datang? Atau memerlukan tenaga medis tertentu? Karena kata Mahmudi, Puskesmas Susukan ini mencakup beberapa desa dengan jumlah masyarakat yang tentunya akan berpengaruh terhadap besaran dana kapitasi yang diterima puskesmas?" tanya Mahmudi.

Menjawab hal itu, Andi mengatakan, pegawai saat ini sudah mencukupi dengan total 62 orang. Dokter Umum 2 orang, Dokter gigi 1 orang, Perawat 21 orang dari standarnya hanya 5 orang, Bidan 23 orang dari standarnya hanya 7 orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat 1 orang, Tenaga Kesehatan Lingkungan 1 orang, Tenaga Gizi 1 orang, Tenaga Kefarmasian 3 orang dari standarnya hanya 2 orang, Tenaga Administrasi 2 orang, Sopir 1 orang, serta Prakarya 2 orang.

Selain itu, dalam wilayah kerja yang mencakup 7 desa, dengan total sebanyak 47.562 jiwa. Puskesmas Susukan telah didukung 1 puskesmas pembantu, serta 53 posyandu yang tersebar di ketujuh desa yang ada, dan memiliki jumlah kader posyandu 265 orang.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Hj Ismiyatul F Y Bcomm MPA, juga mempertanyakan program rutin dan inovatif, dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya untuk anak balita, ibu hamil, dan lansia.

Andi menyampaikan, dalam memberikan pelayanan kese-



hatan khusus anak balita, ibu hamil, dan lansia. Ia bilang, telah melakukan beberapa program diantaranya; TT KIRI (Temukan, Tangani Kehamilan Resiko Tinggi) berupa edukasi kehamilan, POLANTAS (Poliklinik Lansia Tetap Waras), CANTING BERSIAGA (Cegah Stunting Berbasis Sanitasi dan Asupan Gizi Untuk Masa Depan Bersama), dan JASUKE TB (Jaring Suspek Entasan TB).

"Untuk ibu hamil, kita sarankan penerapan pola makan dengan gizi seimbang. Sedangkan untuk anak bayi, kita harapkan untuk memperoleh ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, mengkonsumsi makanan pendamping ASI mulai usia 6 bulan serta pengukuran tinggi dan be-

rat badan secara rutin di posyandu. Sedangkan, untuk perihal sanitasi, adalah peningkatan akses air bersih untuk seluruh warga, sehingga semua warga diharapkan memiliki fasilitas sanitasi yang memadai.

Selain itu, pelayanan pada masa pandemi seperti sekarang. Puskesmas Susukan, Andi bilang, telah menerapkan program DOLANAN, yaitu Daftar Online Tanpa Antrian. Bahkan, sebelum adanya covid-19. Dari tahun 2019, Puskesmas Susukan sudah menerapkan program tersebut.

"Jadi masyarakat yang ingin berobat cukup daftar dari rumah, melalui aplikasi whatsapp ke nomor 0812-12345-926 dan pasti dapat nomor antrian," katanya. •suf

Fraksi PKS Kabupaten Cirebon Menggapai Masyarakat Madani!

Bagi Fraksi PKS Kabupaten Cirebon, kemajuan bukan sekedar soal fisik. Mewujudkan masyarakat madani menjadi cita-cita utama. Bagaimana mereka memperjuangkannya?



Wakil rakyat bukan paduan suara," sebat lirik lagu Iwan Fals yang berisi kritik. Ia menyorot peran fungsi Wakil Rakyat. Mereka sebagai representasi dari rakyat harus mampu menyuarakan aspirasi. Bekerja secara tulus demi kepentingan dan kemaslahatan rakyat.

Menjawab kritik itu, Fraksi PKS (F-PKS) DPRD Kabupaten Cirebon melaksanakan fungsi legislatif secara substantif. "Kami mengusulkan Raperda pengelolaan sampah. Pengelolaan harus melibatkan banyak stakeholder,

misalnya Dinas Pendidikan. Perlu kurikulum yang menumbuhkan sikap peduli siswa terhadap lingkungan," jelas Fawaz, Ketua Fraksi PKS.

Sebagai garda terdepan perjuangan partai, F-PKS bertekad menjadi fraksi yang lebih aspiratif. "Kami mengharapkan terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang madani, sejahtera, cerdas, dan berbudaya," terangnya.

Tekad tersebut diwujudkan dalam program hari aspirasi. "Setiap anggota fraksi harus punya waktu untuk menerima tamu di kantor. Misalnya hari

senin harus ada anggota yang *standby*. Program ini selanjutnya diinformasikan kepada masyarakat," terangnya.

Program hari aspirasi menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menumpahkan keluhan dan berdialog dengan wakilnya. Mereka tidak harus menunggu agenda reses untuk menyampaikan aspirasi. Hubungan mereka dengan wakilnya pun semakin dekat.

F-PKS pro aktif dalam mewujudkan masyarakat madani, sesuai cita-cita besar partai. Kondisi masyarakat yang menjunjung

tinggi adab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Menghargai nilai luhur bangsa yang diamalkan dalam setiap ruang kehidupan.

Sejahtera, cerdas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai lokalitas yang luhur merupakan langkah mewujudkan masyarakat madani. Dalam prakteknya tidaklah mudah. Oleh karena itu, perlu kerja keras dan kerjasama antara legislatif dan eksekutif.

F-PKS mendorong pemerintah daerah agar responsif dan serius dalam melaksanakan kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon madani "Pertama kita mencoba berdialog dan menyampaikan pemikiran kepada eksekutif. Kita tidak bisa jalan sendiri, eksekutornya adalah eksekutif," terangnya.

Cita-cita partai dapat terwujud apabila setiap anggota solid. Dalam rangka itu, F-PKS rutin melakukan pertemuan. Selain dalam rangka mensolidkan setiap anggota, juga merupakan ajang untuk saling memberi masukan.

"Kita biasanya saling mengingatkan tentang visi misi partai, juga agar tidak terjebak pragmatisme politik. Biasanya saya menyampaikan agar tidak melupakan peran kita di dewan, jangan sampai kepentingan pribadi lebih menonjol dari visi misi partai. Karena tidak ada anggota dewan yang dipilih mandiri," pungkasnya.

Berikut lima anggota Dewan F-PKS yang aspiratif untuk mewujudkan masyarakat kabupaten Cirebon madani: Kab. Cirebon.



Ahmad Fawaz, S. TP
Cirebon, 07 Juni 1983

Nurkholis, S. Pd. I
Cirebon, 12 April 1974

H. Junaedi, ST
Cirebon, 05 September 1974

Drs. H. Mohammad
Ridwan, M. Pd. I
Cirebon, 17 Agustus 1967

Nova Fikrotushofiyah, Lc
Cirebon, 18 November 1986

Ahmad Fawaz; Ridlo orang tua adalah segalanya

Tidak banyak yang tahu kisah detail sosok ini. Ialah Ahmad Fawaz, tidak misterius namun tampak pribadi yang serius. Namun dibalik tampilannya yang bersih dan rapih, tersimpan kisah unik dan menggelitik.

Lahir di lingkungan pesantren Baitul Hikmah Tegalgubug Kabupaten Cirebon, Fawaz tumbuh menjadi pribadi religius. Berpegang pada sebuah hadits Rasul, prinsipnya adalah "*Khoirunnasi anfa'uhum linnas*", menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi sesama.

Setelah tamat dari SMPN 1 Ajawinanang, pria kelahiran 07

Juni 1983 ini melanjutkan studi di Bogor. "SMA saya di Dwiwarna Bogor, itu juga karena di dorong uwa untuk mengikuti program beasiswa. Alhamdulillah masuk dan saya lanjut disana," Cerita fawaz.

SMA Dwiwarna merupakan sekolah berbasis pesantren modern. Memiliki keunggulan sistem *bilingual* dan kultur akademis yang kuat. Disinilah Fawaz mendapat pengalaman, bimbingan, dan gemblengan yang berharga. "Sekolah disini membuat saya memiliki rasa percaya diri. Saya diajarkan cara berbicara, berdiskusi, dan berdebat," terangnya.

Kepercayaan dirinya tumbuh sebab metode belajar sang guru menarik. Mereka tidak hanya menjelaskan materi, namun membebaskan peserta didik. "Guru-guru di SMA kebanyakan lulusan UI dan IPB. Rata-rata mereka adalah aktivis 98. Jadi mereka menanamkan cara berdebat. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berargumentasi. sehingga siswa antusias," jelasnya.

Setelah lulus SMA pada 2001, ia melanjutkan ke Universitas Brawijaya Malang dengan jurusan Teknologi Pertanian. Merasa jenuh perkuliahannya banyak di



laboratorium, ia lari menjadi aktivis. Beberapa kali turun ke jalan berdemonstrasi. “Saya malas kuliah, jadi ikutan demo. Kuliah lima tahun, hanya di tahun terakhir yang serius,” candanya.

Memiliki banyak kawan dari beragam organisasi pergerakan, membuatnya kaya pengalaman. “Kalau di kampus banyak berinteraksi dengan berbagai aktivis organisasi. Saya berteman dengan ketua GMNI, satu kosan dengan ketua PMII Fakultas, dengan KAMMI juga dekat. Karena dulu PKS paling bisa masuk ke kampus, sehingga saya lebih banyak mengenal,” jelasnya.

Menjadi aktivis mengingatkannya pada hasil psikotes yang pernah ia ikuti semasa masuk SMA. “Dulu saat psikotes, saya disarankan masuk IPS. Tapi karena *grade* nilai saya tinggi agak gengsi kalau masuk IPS, jadi saya milih IPA yang *grade* 2. Seharusnya sesuai hasil itu bakat saya di bidang sosial. Karena malas kuliah di lab dan lebih suka menjadi aktivis,” terangnya.

Setelah memperoleh gelar sarjana Teknik pertanian, ia memutuskan untuk kembali ke

kampung halaman. Memiliki jiwa sosial yang tinggi dan bekal menjadi seorang aktivis, ia justru membuat sebuah gerakan sosial ketimbang bergelut pada bidang pertanian.

“Kepedulian terhadap masyarakat mendorong saya untuk menghubungi kawan-kawan yang memiliki kesamaan visi misi. Mereka juga orang-orang Tegalgubug yang lulus dari UNPAD, Bogor, dan sebagainya. Kami membentuk FORTA (Forum Remaja Tegalgubug) dan melakukan kegiatan sosial. Saya juga dipercaya untuk menjadi ketua IRMAS” jelasnya.

Forum tersebut membuatnya berinteraksi dengan banyak orang, termasuk dengan pengurus PKS Kecamatan Arjawinangun. Dari sinilah memorinya dengan PKS semasa menjadi mahasiswa kembali tersambung. “Pemilu 2009 saya bertemu teman-teman PKS yang ada di Arjawinangun, mereka pentolan PKS. Saat itu saya diminta menjadi Caleg,” ungkapnya.

Kini ia menjadi anggota dewan. Memiliki peran lebih besar memberikan manfaat bagi

konstituen dan masyarakat Kabupaten Cirebon. Periode 2019 – 2024 ini merupakan ketiga kalinya ia duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Cirebon. Sebuah torehan karir politik cemerlang di usia yang masih muda.

Banyak hal ia lakukan untuk membantu masyarakat. Misalnya pada periode pertama ia berada di komisi 2 bidang pertanian, ia mendengar permasalahan para petani dan membantu memberikan solusi. Periode selanjutnya berada di komisi 3 dan fokus pada masalah sampah. Namun ia merasa tidak maksimal sebab minimnya dukungan eksekutif.

“Sekarang di Komisi 4 saya fokus pada kesehatan dan pendidikan. Hari ini Alhamdulillah Kabupaten Cirebon sudah ada UHC, berawal dari usulan Komisi 4. Kita rapat dengan semua stakeholder. Masyarakat yang tidak punya BPJS bisa langsung di daftarkan dan langsung aktif. Meskipun masih belum maksimal sebab belum jelas data masyarakat yang non aktif BPJS nya,” jelasnya.

Secara karir politik, Fawaz memiliki rekam jejak yang baik. Namun ia tidak berambisi untuk menempati posisi tertentu. Bahkan jika bukan karena mandat partai untuk maju, ia memilih fokus menjadi pengusaha, mengurus masjid, dan pesantren.

Prinsip utama yang ia pegang adalah taat kepada orang tua. “Saya sampaikan ke partai kalau dimandatkan kemana dan orang tua setuju, saya laksanakan. Tapi kalau orang tua tidak setuju, meskipun diberi mandat menjadi bupati secara cuma-cuma, saya akan tolak. Bagi saya, selama orang tua masih ada mereka harus setuju. Karena Ridlonya jauh lebih baik,” pungkasnya. • Mol

Desa Palir; menyulap irigasi penuh sampah menjadi kolam ikan mengalir

Budidaya ikan di empang sudah biasa, bagaimana jika dilakukan pada saluran irigasi penuh sampah? Desa Palir, Kecamatan Tengahtani mampu mewujudkannya. Mereka merubah irigasi yang kotor menjadi kolam ikan. Kok bisa?



Saluran irigasi seyogyanya mampu mengalirkan air dengan lancar. Menyuburkan pertanian dan membersihkan perkampungan. Na-

mun perkembangan masyarakat dari tradisional menjadi modern justru mendatangkan persoalan lingkungan, sampah diantaranya. Hingga irigasi berubah

menjadi bak sampah. Adalah Durakman, Kepala Desa Palir Kecamatan Tengahtani yang memiliki ide untuk menyulap saluran irigasi menjadi

kolam ikan. Ia terinspirasi dari saluran irigasi di negara Jepang yang bersih dengan beragam jenis ikan. "Inspirasi datang dari negara Jepang melalui media sosial seperti *Youtube*. Selanjutnya saya berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pendamping desa untuk merealisasikannya," jelasnya.

Selain terinspirasi oleh negara Jepang, alasan pembangunan saluran irigasi menjadi kolam ikan muncul atas rasa prihatin terhadap minimnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Sebab tak sedikit saluran irigasi dipenuhi sampah. "Fungsi saluran irigasi itu kan banyak, misalnya untuk pengairan sawah," terangnya.

Setelah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan pendamping desa, rencana tersebut di eksekusi melalui Anggaran Dana Desa 2019 sekitar Rp 77 juta. Selain membenahi saluran irigasi, pemdes membangun tempat duduk yang bisa difungsikan untuk tempat nongkrong warga yang ingin memberi makan ikan.

Mulanya tidak sedikit warga yang berkomentar sinis dengan beranggapan bahwa pembangunan tersebut tidak wajar. "Kita sudah memiliki gedung, jalanan kampung pun sudah bagus, jadi kita mencoba terobosan baru yang mungkin dianggap aneh oleh beberapa warga," terangnya.

Usai rampung digarap, antusiasme masyarakat cukup tinggi. Irigasi yang disulap menjadi kolam ikan tersebut viral di media sosial. Banyak pengunjung datang dari luar desa Palir karena penasaran. Fenomena viralnya desa Palir mendadak menjadikannya lokasi wisata. "Pengunjung yang datang bukan



saja dari kecamatan Tengahtani dan Plered, namun juga ada yang datang dari Losari dan daerah lainnya," jelasnya.

Pengunjung merasa senang dan mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh Pemdes Palir. "Dapat info di media sosial (medsos) kalau ada selokan yang ada ikannya. Kesini terus beli pakan ikan, anak-anak bisa ikutan memberi makan ikan di sini. Ini bagus bisa menjadi wisata warga dan hiburan," jelas Yadi, pengunjung yang datang bersama istri dan anaknya.

Kini area irigasi tersebut menjadi wisata baru yang murah meriah. Tanpa tiket, pengunjung dapat melihat dan memberi

makan ikan atau sekedar duduk santai. Adanya wisata ini membawa berkah bagi warga sekitar. Mereka mendadak berjualan, sehingga menggeliatkan perekonomian.

Seperti yang dilakukan oleh seorang pemuda yang kini berjualan ikan dan menyediakan pakan ikan. Biasanya pengunjung membeli palet untuk diberikan pada ikan yang berada di kolam irigasi. "Saya berjualan semenjak disini ramai. Saya melihat potensi bahwa ini bisa menjadi peluang usaha untuk memperoleh pendapatan," terang Gunawan.

Selain Gunawan, banyak pula warga yang berjualan aneka makanan dan minuman. Bah-



Durakman (Kuwu)



kan pada saat awal-awal viral, kondisi sekitar lokasi wisata ini penuh sesak pengunjung dan pedagang. "Penuh sesak, apalagi kalau sore dan hari minggu. Odong-odong pun turut kecipratan untung dari ramainya pengunjung," jelas Durakman.

Saat ini pengelolaan dilakukan oleh karang taruna dan warga sekitar lokasi kolam ikan. Namun dirasa masih belum maksimal. "Saya sih berharap dibuat pengurus yang jelas untuk mengelola irigasi kolam ikan. Paling tidak supaya ada yang bertanggung jawab membersihkan," jelas Gunawan.

"Selain itu, ikan yang ada bisa di budidaya sebagaimana mestinya. Sehingga bukan saja menebar ikan di irigasi, tapi mengelola dengan baik sesuai dengan prinsip budidaya. Dari mulai benih, memilah berdasarkan ukuran, dan termasuk misalnya dijual. Sehingga bisa mendatangkan *income*," lanjutnya.

Sejalan dengan usulan Gunawan, Pemdes Palir pun berencana mengembangkan kolam ikan saluran irigasi. Selain itu juga kedepan akan ada kolam pemancingan ikan dibelakang kantor desa dan menggeliatkan ekonomi kreatif. Pemdes berharap hal itu bisa menggeliatkan perekonomian dan mensejahter-

akan masyarakat. "Tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat," jelas Durakman.

Muncul persoalan ketika Covid 19 datang. Semua anggaran desa banyak dialihkan untuk penanganan Covid 19. Belum lagi perawatan fasilitas umum seperti aspal yang mulai rusak karena musim hujan. Sehingga rencana pengembangan irigasi kolam ikan dan ekonomi kreatif tertunda. "Kita menunda rencana, sebab dana dialihkan untuk penanganan Covid 19," terangnya.

Padahal, adanya upaya menyulap irigasi yang dahulu penuh sampah menjadi kolam ikan memberi banyak hikmah. Masyarakat mulai sadar terhadap pola hidup bersih. Tidak membuang sampah sembarangan dan memahami pentingnya irigasi. Dari sisi ekonomi menggeliatkan aktivitas para pedagang sekitar.

Gebrakan yang dilakukan Pemdes Palir perlu diikuti oleh Pemdes lainnya. Bagaimana menciptakan solusi tentang persoalan sampah. Juga upaya menggeliatkan perekonomian masyarakat desa dengan beragam terobosan yang kreatif. Sebab, pembangunan yang efektif dimulai dari masyarakat desa. •Mol

Kerajinan Barang Bekas

Potensi Gua Lor nan Menawan

Padahal dengan karya bisa menaikkan pertumbuhan perekonomian yang ada di daerahnya. kenapa tidak ada yang tergugah?



Foto: foto: ihsanick

Bukan sombong. Ia hanya ingin usahanya dapat memotivasi pemuda lainnya. Bukan untuk pamer. Ia hanya ingin kreatifitasnya dapat mengangkat desa kelahirannya.

Ialah Nurudin, seorang pemuda yang memiliki daya kreatifitas tinggi. Awalnya hanya mengajari anak-anak, hingga sekarang menjadi kesenangan bagi dirinya sendiri. Barang bekas yang sudah tidak dipakai itu, bukannya masuk tong sampah, malah ia buat menjadi macam-macam karya dan hiasan bernilai rupiah.

Barang bekas yang ia gunakan pun beraneka ragam. Benda karya beda bahan juga. Contohnya seperti ia membuat gantungan kunci dan gelas dari bambu. Gelang, liontin kalung dan pisau yang terbuat dari tulang atau tanduk kambing. Serta lukisan dan replika menara yang terbuat dari sisa kaca pembuatan etalase dan masih banyak lagi.

Bahan yang digunakan seperti kayu, ia dapatkan dari pinggir kebun atau halaman orang yang sudah tidak dipakai, termasuk bonggol pohon untuk membuat bonshai. Sedangkan kaca yang

nantinya akan dibuat replika menara atau lampion, diperoleh dari sisa-sisa pembuatan etalase.

Selain barang bekas yang ia sulap, ia juga membuat benda-benda estetik dari barang baru, seperti bonshai pohon, yang terbuat dari kawat putih.

Pria yang biasa disapa "Udin" itu mengaku, bahwa semua hasil karyanya dibuat murni oleh tangannya sendiri. "Bagi saya, handmade itu lebih menawan, lebih artistik dan tidak abal-abal. Walaupun bentuknya tidak serapih pakai mesin. Yang mahal itu prosesnya," akunya.

Ketertarikan Udin dalam membuat karya seni dimulai pada tahun 2014, saat dirinya masih menjadi santri di Buntet Pesantren Cirebon. Ia mengungkapkan bahwa daripada menganggur ketika malam, lebih baik ia membuat suatu karya.

Karya-karya yang Udin buat, tak sedikit dibeli oleh warga sekitar. Salah satunya adalah lukisan kaca bergambar Dewa Shiwa, yang diukir dengan tangannya sendiri telah terjual oleh kuwu desanya. Selain itu Udin juga sempat mensuplai karya buataannya ke salah satu toko aksesoris terbesar di Kota Cirebon, yakni You and Me. Namun tidak semuanya, hanya karya yang menurutnya berkelas saja yang ia masukkan, yaitu bonshai, terbuat dari lilitan kawat putih yang apik dan menawan.

"Sudah lebih dari sekitar 25 unit bonshai yang saya suplai. Diban-

drol sekitar Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu rupiah." Katanya.

Namun siapa sangka, ternyata bukan lembar uang yang ia harapkan. Udin ternyata mempunyai tujuan utama lewat kemampuannya itu. Ia berharap apa yang ia lakukan bisa membangkitkan semangat kreatifitas para pemuda yang ada di desanya.

Tanpa memungkirkan perasaannya sendiri, ia ingin popularitas serta pengakuan dari masyarakat sekitar. Bukan sebagai bahan untuk menyombongkan diri, tetapi Udin ingin, jika kepopuleran yang nanti didapatkannya itu, akan memotivasi banyak pemuda. Sehingga turut bergabung bersamanya mengembangkan suatu karya seni.

Namun, usaha Udin menumbuhkan gairah teman-teman di sekelilingnya rupanya belum membuahkan hasil. Menurutnya, ia belum mendapat dukungan serta apresiasi. Padahal ia sangat berharap setelah menunjukkan kemampuannya itu, akan ada kemajuan bagi desanya sendiri.

Udin, tidak menjadikan kemampuannya itu sebagai profesi untuk mencari nafkah sehari-hari, yang akan membuatnya terlalu fokus bekerja hingga melalaikan kewajiban. Selagi ia masih bisa makan dan memiliki tempat untuk beistirahat, baginya membuat barang yang dipesan saja sudah cukup.

Pemuda yang juga merupakan seorang guru ngaji itu, lebih mengutamakan tugas mullianya mengajar ngaji, dari rumah ke rumah, serta di rumahnya sendiri. "Selain anak-anak, para remaja juga turut belajar di rumah, namun Cuma beberapa gelintir saja," ungkapnya.

Kesenangannya membuat suatu karya seni, ia tunjukan agar bisa mengalihkan pikiran ketika dirinya sedang dalam masalah. Sudah banyak sekali karya-karya yang ia buat. Namun ia tidak mau menjualnya



lagi, apalagi dengan harga yang merendahkan seorang pembuat karya handmade.

Ia juga bilang, sering membagi-bagikan karya buataannya kepada orang-orang tertentu. Seperti kepada teman, guru yang menurutnya luar biasa. Bagi Udin, yang paling berharga adalah ketika karyanya dipegang oleh orang-orang yang luar biasa.

Ia mendambakan membuat sebuah cafe tepat di lahan depan rumahnya. Ia ingin seluruh karya yang ia buat dan simpan

nantinya bisa dipamerkan di cafenya tersebut. Selain tempat untuk nongkrong dengan teman-temannya, Udin berencana menjadikan cafe itu sebagai sekretariat karang taruna serta menyediakan berbagai makanan dan minuman yang hasilnya akan diarahkan untuk koperasi.

Udin juga berharap, bisa memperbaiki para pemuda yang sering bermain judi, meminum arak yang ada di desanya. "Ini adalah pr yang cukup berat bagi saya," pungkasnya. •sar

Mohamad Luthfi



Bagai Kepompong

Pagi itu, di taman belakang rumah, ada pemandangan menarik. Seekor burung pipit, yang sigap, tiba-tiba balik kanan. Ia tak jadi menyan-tap ulat di ranting pohon. Penasaran, saya pun mendekati ulat itu.

Ternyata, makhluk yang saya kira ulat itu sudah menjadi kepompong. Kulitnya yang keras tentu saja menyulitkan burung untuk memakannya. Padahal, kandungan proteinnya sangat tinggi, melebihi jangkrik, ikan, daging sapi, dan kacang-kacangan.

Saya teringat dengan resep rahasia para kicau mania agar burungnya gacor. Mereka membuat *extra food* (makanan tambahan) burung dari kepompong. Kulitnya disobek dengan pisau, lalu disajikan langsung isinya. Ada juga yang isinya dijadikan tepung, lalu dicampurkan dengan pakan.

Selain itu, kepompong adalah tahapan serangga akan naik kelas. Dari berdiam diri, menuju terbang bebas di udara. Berdiam diri itulah kini juga dianggap menjadi laku mujarab bagi manusia.

Di tengah pandemi Covid-19, manusia diminta berdiam diri di rumah, bahkan mengisolasi diri. Bisa jadi inilah salah satu fase kepompong dalam peradaban manusia di bumi.

Manusia diminta merenungkan atas apa yang diperbuatnya di muka bumi. Manusia diminta membersihkan bumi dari segala polusi. Bumi sepertinya sedang menginginkan agar makhluk yang menghuninya menghirup udara segar.

Burung-burung liar, terutama di perkotaan, diberi kesempatan untuk menikmati udara bersih. Kicau mereka, suara jangkrik, tokek, bahkan kodok terdengar lebih nyaring. Tak lagi kalah bersaing dengan mesin yang bising. Senandung alam sedang memainkan pentasnya.

Bagaimana dengan manusia sebagai pribadi? Berada dalam kepompong, idealnya manusia melakukan proses transformasi diri. Bersiap naik kelas. Terbang menyambut dunia yang sudah kembali segar

dan cantik. Dunia baru pun diisi manusia-manusia baru, dengan kebiasaan baru.

Manusia, di masa pandemi, sejatinya dipaksa untuk senantiasa membersihkan diri, baik secara fisik, pikiran, jiwa maupun hati. Protokol kesehatan mengharuskan setiap saat manusia membersihkan fisiknya.

Berdiam diri sebenarnya memaksa manusia untuk introspeksi diri. Membersihkan pikiran dari anasir negatif. Kembali menemukan hakikat diri, baik sebagai pribadi, kepala keluarga, bagian dari keluarga, hingga sebagai pejabat negara.

Mengisolasi diri sebenarnya memberikan ruang lebih banyak untuk membersihkan hati dan jiwa. Lebih mendekati diri kepada yang Maha Pencipta. *Taqarrub ilallah*. Membersihkan hati dari kesombongan, iri, dengki, dan ketamakan.

Manusia disadarkan bahwa kekuasaan itu bukanlah kebesaran dan kekuatan. Tuhan membukakan mata bahwa virus yang super kecil saja mampu mematikan manusia, dan membuat ekonomi dunia lumpuh.

Meski begitu, banyak juga yang tidak menganggapnya sebagai sebuah 'kepompong'. Masih banyak manusia yang terus menghiasi diri dengan kesombongan, keangkuhan, dan ketamakan. Bahkan semakin menggila, sebut saja misalnya, bantuan bencana malah dikorupsi.

Akhirnya kembali lagi pada pribadi masing-masing. Meski Covid-19 memaksa manusia untuk mengkarantina diri, namun tidak semua mengikuti irama alam untuk bertransformasi diri.

Sebaliknya, jika 'kepompong' ini kita tangkap secara substansial, maka transformasi diri tidak harus menunggu atau dipaksa oleh virus corona. Setiap saat, kita bisa mentransformasikan diri, menjadi pribadi yang senantiasa lebih baik dari sebelumnya.

Membersihkan badan, pikiran, hati, dan jiwa harus senantiasa kita lakukan. Bila perlu, lebih cepat dari siklus kepompong menjadi kupu-kupu



SEKRETARIS DPRD
DAN SELURUH PEGAWAI



Mengucapkan:

DIRGAHAYU
KE 75 - TNI

SINERGI UNTUK NEGERI

5 Oktober 1945 - 5 Oktober 2020





PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
Mengucapkan:



**DIRGAHAYU
KE-75 TNI
SINERGI UNTUK NEGERI**

5 OKTOBER 1945 - 5 OKTOBER 2020